

Anastasia Friska Koni Dowa

by UNITRI Press

Submission date: 24-Jun-2024 12:54PM (UTC+0800)

Submission ID: 2407667101

File name: Anastasia_Friska_Koni_Dowa.docx (139.25K)

Word count: 1353

Character count: 9105

**ANALISIS PERAN, EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
DESA ORO ORO OMBO KOTA BATU**

SKRIPSI



Oleh :

ANASTASIA FRISKA KONI DOWA

NIM : 2020110100

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2023

RINGKASAN

Salah satu strategi untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, fungsi dan keterlibatan pemerintah desa dalam masyarakat sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana, efektifitas, dan tingkat keterlibatan masyarakat pemerintah desa di Desa Oro-Oro Kota Batu dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu untuk mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dua jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan untuk penelitian ini. Tiga metode yang digunakan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, visualisasi data, dan reduksi data. Selama uji validasi data, pendekatan triangulasi sumber digunakan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu telah melaksanakan hasil penelitian, fungsi dan efektivitas pemerintahan desa, serta pelibatan masyarakat. Namun pelaksanaannya belum sempurna, karena capaian PBB maksimal hanya mencapai 72,57% dengan kriteria kurang bermanfaat dan 51,09% terendah dengan persyaratan kurang bermanfaat. Hal ini disebabkan karena minimnya pelibatan masyarakat dan tata kelola desa, khususnya adanya kesenjangan komunikasi antara keduanya. Pemerintah desa kurang tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, subjek dan objek pajak tersebar di masyarakat, serta banyak masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, pelaporan objek pajak yang keliru, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, dan kurangnya dorongan atau bantuan dari pemerintah desa untuk memahami pentingnya pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan beberapa kekurangan masyarakat. Pemerintah desa harus bekerja lebih keras untuk mempererat hubungan antar tetangga, memberi inspirasi dan semangat kepada masyarakat, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi, serta memberikan sanksi yang lebih berat.

Kata Kunci : Peran, Efektivitas, Pemerintah Desa, Kepatuhan, PBB

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan komponen utama kegiatan ekonomi Indonesia karena pajak memberikan sebagian besar pendapatan negara (Suhendri et al. 2021). Komponen utama dari setiap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan pajak. Pembangunan nasional akan berlangsung jika dana tersedia. Pemerintah dan sektor bisnis, baik lokal maupun internasional, merupakan salah satu sumber pendanaan. Salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran dan pembangunan nasional adalah sistem perpajakan. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, menurut anggaran pendapatan negara (APBN) (Lohonauman, 2016). Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang relevan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya merupakan salah satu aspek dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Penghindaran pajak akan terhambat oleh tidak membayar pajak (Risnarningsih dkk., 2023). Risnarningsih (2022) mengklaim bahwa salah satu metode perolehan pendapatan bagi daerah adalah perpajakan.

Menurut Finance (2007), membayar pajak kepada pemerintah merupakan kewajiban hukum yang berlaku bagi masyarakat maupun organisasi. Tanpa adanya kewajiban pajak sebagai imbalan atas imbalan langsung dana

tersebut digunakan untuk tujuan negara yang berkaitan dengan kesejahteraan publik. Dalam hal ini, pajak sangat penting bagi masyarakat dan menjadi prioritas utama pemerintah karena pajak mendanai sebagian besar pembangunan infrastruktur dan utilitas.

Di antara beberapa bentuk pajak yang tersedia adalah pajak daerah. Pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi adalah dua bagian dari pajak daerah. Pendapatan daerah awal yang tersedia untuk pembangunan daerah berasal dari pajak ini. Pajak daerah mencakup uang yang diterima dari PBB, bagian dari pajak kabupaten/kota. ¹⁷ Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting dan menjanjikan untuk mendukung kebutuhan dan pertumbuhannya adalah PBB. Arianna dan Kurniawan (2019) menegaskan bahwa PBB wajib bagi warga negara Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam ⁵ Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pajak Daerah (Keuangan, 2016), ²² pemerintah daerah telah memungut pajak bumi dan bangunan dari pemerintah sejak 2011.

PBB merupakan sumber pendapatan utama di daerah. Tanah dan bangunan termasuk jenis properti yang dicakup PBB. Berdasarkan ukuran dan jumlah bangunan yang ada, setiap daerah menerima jumlah uang yang berbeda dari pajak bumi dan bangunan, menurut Rahmawati (2020). Untuk membantu menjamin tidak ada faktor tambahan yang dapat memengaruhi seberapa baik pendapatan PBB digunakan, kepatuhan wajib pajak harus didorong. Suhendri dkk. (2021) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai keadaan di mana wajib pajak telah membayar semua pajaknya dan memenuhi komitmennya. Namun

lebih tepatnya, menurut Suhendri dkk. (2022) pemerintah masih merasa sulit untuk mendapatkan PBB.

Hampir di mana pun sistem pajak diterapkan, selalu ada masalah kepatuhan, khususnya terkait PBB. Selain ketidakpatuhan, pemerintah desa mungkin menghadapi tantangan lain dalam upaya mengoptimalkan pendapatan PBB. Tantangan tersebut meliputi pengetahuan atau instruksi yang tidak memadai, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, kurangnya edukasi publik tentang PBB, dan ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah desa (Khunaify, 2019).

Sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, PBB perlu menggalang dana lebih banyak lagi untuk melibatkan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintahan desa ⁶ terdiri dari kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa, yaitu Desa Oro Oro Ombo, Kota Batu (Suhendri dkk., 2024). Pemerintah desa dianggap paling berperan dalam hal ini. Agar masyarakat dapat membayar PBB dan memenuhi persyaratan pendaftaran dengan mengisi SPT dengan benar dan lengkap, kinerja pemerintah desa harus membantu dan melibatkan masyarakat secara adil (Suhendri dkk., 2023).

Masyarakat harus menjadikan pembayaran pajak sebagai kebiasaan atau tradisi agar taat membayar, khususnya PBB ¹⁶ (Pajak Bumi dan Bangunan). Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang tepat sangat penting bagi pembangunan infrastruktur suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kontribusi penerimaan pajak terbesar bagi pembangunan daerah berasal dari

PBB. PBB memberikan kontribusi keuangan terbesar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuan pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata (Risnainingsih, 2022). Pelibatan masyarakat dalam pembayaran PBB menjadi sangat penting karena semua kegiatan pembangunan desa harus dibiayai oleh pendapatan asli desa.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ketidakpatuhan tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi, karena pemerintahan desa tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif, masyarakat pun kesulitan untuk ikut membayar pajak bumi dan bangunan. Para pemimpin desa, termasuk para camat, harus bertindak sejalan dengan kinerja pemerintah desa dalam mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar dapat memutuskan tindakan atau penyelesaian terbaik terhadap setiap masalah yang mungkin timbul. Banyak warga yang tidak ikut serta dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena tugas utama pemerintah desa adalah sebagai penunjang atau pemberi inspirasi bagi masyarakat. Untuk mengetahui fungsi pemerintahan desa dan keterlibatan masyarakat di Desa Oro Oro Ombo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa dalam menegakkan dan mengatur partisipasi masyarakat dalam kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Peran, Efektivitas Pemerintah desa Dan Partisipasi

Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Desa Oro Oro ombo Kota Batu.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa, masyarakat, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong pembayaran PBB dari masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menilai bagaimana pemerintah desa terlibat dan menjalankan perannya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB.
2. Untuk menentukan tantangan apa yang harus diatasi oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB.

1.4 Paradigma Penelitian

Secara khusus, peran, efektivitas, dan keterlibatan masyarakat pemerintah desa dalam mendorong kepatuhan membayar PBB disorot. Penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi deskriptif di mana peneliti menjelaskan dan menggambarkan suatu peristiwa yang menjadi sudut pandang. Dengan paradigma ini, proses-proses yang melatarbelakangi fenomena tersebut akan dikaji untuk lebih memperjelas proses penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Mampu menerapkan teori dalam praktik dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang analisis peran, efektivitas pemerintahan desa, dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB, sebagaimana diperoleh dari perkuliahan.

2. Bagi Universitas

Kajian ini dapat memberikan pemahaman lebih dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan penelitian bagi para calon penulis.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah di desa dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini meningkatkan kepatuhan pajak

Anastasia Friska Koni Dowa

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	Prima Okta Islamiyah, Sukaris Sukaris. "Peran Komunikasi Dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Karyawan PT. Duta Merpati Indonesia", Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan, 2021 Publication	1%
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%
4	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%
5	ANDI MIRDAH. "INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2016 Publication	1%
6	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	1%

7	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	1 %
8	docplayer.info Internet Source	1 %
9	id.scribd.com Internet Source	1 %
10	mahalipan.blogspot.com Internet Source	1 %
11	pt.scribd.com Internet Source	1 %
12	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
13	shalehibrahim.wetpaint.com Internet Source	1 %
14	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
15	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
16	eprints.unm.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.usm.ac.id Internet Source	1 %
18	www.researchgate.net Internet Source	1 %

19

Ompusunggu, H. Novri. "Rekonstruksi Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

1 %

20

Zahroh, Isna Fatimatuz. "Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Ipa Di MI Ma'arif Nu I Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

1 %

21

Arnoldus Christo Novrianto, Nurul Aisyah Rachmawati. "THE EFFECT OF INCOME LEVEL, KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS AND TAX OFFICER SERVICES ON COMPLIANCE WITH PAYING LAND AND BUILDING TAXES IN PASAR REBO SUBDISTRICT, EAST JAKARTA", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2021

Publication

<1 %

22

adoc.pub
Internet Source

<1 %

Exclude bibliography On

Anastasia Friska Koni Dowa

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
